

Game Theory & Security Dilemma dalam Konflik Perbatasan Thailand-Kamboja

Muh. Andi Karaka Ilham

Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,
Kota Makassar, Indonesia

*Email Korespondensi: andikaraka111@gmail.com

Diterima: 20-06-2026 | Disetujui: 24-06-2026 | Diterbitkan: 26-06-2026

ABSTRACT

The Thailand-Cambodia border conflict, centered on the Preah Vihear Temple, has repeatedly escalated despite numerous diplomatic efforts. This study analyzes the recurring conflict through the integrated lens of Game Theory and Security Dilemma. Using a qualitative descriptive-analytical method based on secondary data, this research argues that the persistent escalation is not merely a result of territorial disputes, but of strategic rationality trapped in a security spiral. Game Theory explains that each state's military and diplomatic actions are calculated responses to perceived threats and expected payoffs. However, Security Dilemma reveals why these rational decisions backfire: defensive measures are misinterpreted as offensive, triggering reciprocal escalation. The findings show that Thailand and Cambodia are locked in an iterated game where mutual distrust and the lack of a credible enforcement mechanism prevent cooperation, turning rational choices into conflict-prone outcomes. This study concludes that breaking the cycle requires not only diplomatic mediation but also confidence-building mechanisms that address the perceptual roots of the dilemma.

Keywords: Thailand-Cambodia conflict; Security Dilemma; Game Theory; Preah Vihear; ASEAN mediation.

ABSTRAK

Perbatasan Thailand-Kamboja yang berpusat pada Candi Preah Vihear terus mengalami eskalasi berulang meskipun berbagai upaya diplomatik telah dilakukan. Penelitian ini menganalisis konflik berulang tersebut melalui perspektif terintegrasi Game Theory dan Security Dilemma. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif-analitis berbasis data sekunder, penelitian ini berargumen bahwa eskalasi yang persisten bukan semata akibat sengketa wilayah, melainkan karena rasionalitas strategis kedua negara yang terjebak dalam spiral keamanan. Game Theory menjelaskan bahwa setiap tindakan militer dan diplomatik kedua negara merupakan respons kalkulatif terhadap ancaman dan keuntungan yang diharapkan. Namun, Security Dilemma mengungkap mengapa keputusan rasional tersebut justru kontraproduktif: langkah defensif dipersepsikan sebagai ofensif, sehingga memicu eskalasi timbal balik. Temuan menunjukkan Thailand dan Kamboja terperangkap dalam permainan berulang (*iterated game*) di mana ketidakpercayaan mutual dan ketiadaan mekanisme penegakan yang kredibel menghambat kerja sama, sehingga pilihan rasional berujung pada konflik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemutusan siklus konflik membutuhkan tidak hanya mediasi diplomatik, tetapi juga mekanisme pembangunan kepercayaan yang mengatasi akar persepsi dilema keamanan.

Katakunci: Konflik Thailand-Kamboja; Security Dilemma; Game Theory; Candi Preah Vihear; Mediasi ASEAN.

PENDAHULUAN

Asia tenggara merupakan salah satu kawasan yang kaya akan keragaman sejarahnya. Hal ini didukung oleh banyaknya kerajaan yang terbentuk di kawasan ini. Terkadang selain mewariskan keragaman budaya, bahasa, dan latar belakang terciptanya negara itu, dalam kasus tertentu ada kerajaan yang juga mewariskan konflik turun temurun. Konflik tersebut berupa sengketa mengenai perbatasan dua negara, yaitu konflik perbatasan antara Thailand-Kamboja. Beberapa faktor penyebab sengketa ini dimulai dari persaingan budaya, perjanjian era kolonial, dan klaim masing-masing pihak mengenai beberapa kuil di daerah perbatasan. akar terjadinya konflik ini bermula pada abad ke-9 ketika kerajaan Khmer (Kamboja) menguasai sebagian besar wilayah daratan asia tenggara yang mencakup Laos, Vietnam, dan sebagian besar wilayah Thailand. Kemudian seiring berjalannya waktu dan disertai kemunduran kerajaan Khmer, maka munculnya kerajaan Siam (Thailand) sebagai kekuatan baru di wilayah Khmer dan mengambil wilayah Kamboja bagian barat (Teekah, 2025).

Candi Preah Vihear merupakan candi yang terletak di tepi dataran tinggi yang mendominasi dataran Kamboja, hutan seluas 4,6 km² yang berada di sekitar kuil ini menjadi titik sengketa perbatasan antara dua negara tersebut (Meyer, 2009). Pada tahun 1904-1907 Prancis dan Kerajaan Siam melakukan perjanjian yang mengatur pertukaran wilayah dan batas wilayah yang nantinya akan menjadi akar sengketa wilayah Thailand dan Kamboja (Admin, 2025). Sebagai tindak lanjut dari perjanjian tersebut, maka dibentuk sebuah komisi gabungan untuk membuat sebuah peta bernama *Annex I Map* yang menempatkan Candi Preah Vihear dan wilayah di sekitarnya ke dalam teritori Kamboja yang berada di bawah administrasi Prancis. Selama perang dunia kedua, Thailand dan Jepang yang merupakan sekutu berhasil merebut kembali daerah yang dulunya berada di bawah kekuasaan Kamboja, termasuk Kuil Preah Vihear. Namun Thailand mengembalikannya ke Prancis sebagai syarat untuk bergabung ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Setelah kemerdekaan Kamboja di tahun 1953, Thailand kembali menduduki Kuil Preah Vihear. Hal ini memicu reaksi Kamboja untuk membawa kasus ini ke International Court of Justice, kemudian di tahun 1962 ICJ mengeluarkan putusan bahwa Kuil Preah Vihear merupakan milik Kamboja. Namun putusan tersebut tidak mengatur lahan di sekitar Kuil Preah Vihear yang hingga sekarang inilah yang menjadi sengketa perbatasan antara kedua negara tersebut (Meyer, 2009)

Pada tahun 2008 ketika Kamboja mendaftarkan Kuil Preah Vihear sebagai situs warisan dunia ke UNESCO, Thailand memprotes keputusan tersebut yang menyebabkan bentrok antara kedua negara. Ketegangan ini terus meningkat seiring waktu dan memicu bentrok militer dari kedua negara dari tahun 2008-2011 yang menghasilkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan memburuknya hubungan kedua negara. Konflik kembali pecah tepatnya pada tanggal 28 mei 2025, dimana seorang tentara kamboja menjadi korban jiwa akibat peristiwa ini. Eskalasi konflik ini terus meningkat hingga memasuki puncak pada 23 juli, ketika tentara Thailand memicu ledakan ranjau di area tersebut sehingga menimbulkan 5 korban luka-luka. Peristiwa ini semakin memperburuk kondisi kedua negara dan terjadinya penarikan duta besar masing-masing negara. Tepat pada 24 juli, perang pecah di dekat Kuil Ta Muen Thom, dan menyebabkan kedua negara saling melancarkan serangan di 12 lokasi perbatasan (Teekah, 2025). Konflik berulang ini menimbulkan ancaman kepada dua negara tersebut yang dapat mempengaruhi stabilitas kawasan Asia Tenggara apabila hal ini terus berlanjut. Dengan kondisi tersebut, kedua negara ini sudah saling menaruh rasa curiga dan menempatkan hubungan bilateral kedua negara berada dalam ambang krisis.

Dengan berbagai upaya penyelesaian sengketa, konflik terus berulang antara kedua negara secara berkala. Kondisi ini menunjukkan bahwa penyelesaian secara formal belum berhasil menyelesaikan konflik

yang ada. Dalam berbagai periode konflik, masing-masing pihak mengambil langkah yang diinterpretasikan pihak lain sebagai ancaman. Seperti Thailand yang aktif menempatkan militernya di daerah sengketa yang awalnya sebagai tindakan meningkatkan keamanan nasionalnya, namun memicu respon kamboja untuk melakukan hal yang sama. Peristiwa yang terus berulang menimbulkan pertanyaan mengapa setiap langkah yang diambil masing-masing negara untuk merespon pihak lain justru semakin meningkatkan ketegangan yang pada akhirnya akan meningkatkan situasi konflik. Pola ini terus berulang sehingga kedua negara terus terjebak dalam kondisi tersebut. Hal ini perlu dipertanyakan lebih lanjut bahwa bagaimana sebuah negara memberikan kalkulasinya terhadap setiap langkah yang dilakukan pihak lain.

Penelitian mengenai konflik Thailand–Kamboja telah dilakukan dari berbagai perspektif. Meyer (2009) menjelaskan sengketa Preah Vihear melalui aspek historis dan teritorial yang menjadi akar konflik kedua negara. Sementara itu, Ciorciari (2009) berfokus pada dinamika politik dan keamanan yang berkembang setelah meningkatnya ketegangan di sekitar Kuil Preah Vihear. Dalam konteks penyelesaian konflik, Putra et al. (2026) menyoroti peran Indonesia sebagai mediator dalam kerangka ASEAN selama konflik tahun 2008-2011, sedangkan Tokan et al. (2026) mengkaji efektivitas ASEAN dalam menangani konflik Thailand–Kamboja pada tahun 2025. Penelitian lain juga melihat konflik ini dari perspektif hukum internasional, khususnya terkait status Kuil Preah Vihear dan implementasi putusan Mahkamah Internasional (Putra & Astuti, 2026).

Di sisi lain, kajian mengenai *Security Dilemma* dan *Game Theory* lebih banyak diterapkan pada konflik antarnegara lainnya. Jervis (1978) menjelaskan bagaimana upaya negara untuk meningkatkan keamanannya dapat dipersepsikan sebagai ancaman oleh negara lain sehingga memicu spiral konflik. Konsep tersebut kemudian digunakan dalam berbagai studi kontemporer, seperti konflik Rusia- Ukraina (Muradov, 2022) maupun rivalitas India-Pakistan (Raeesa & Akhtar, 2025). Sementara itu, Snidal (1985) dan Correa (2001) menunjukkan bahwa *Game Theory* dapat digunakan untuk memahami bagaimana aktor negara melakukan kalkulasi strategis dalam situasi konflik maupun kerja sama internasional.

Berdasarkan survei literatur yang dilakukan, sebagian besar penelitian mengenai konflik Thailand–Kamboja masih berfokus pada aspek historis, hukum internasional, serta peran ASEAN dalam proses penyelesaian konflik. Di sisi lain, penelitian yang mengintegrasikan perspektif *Game Theory* dan *Security Dilemma* untuk menjelaskan dinamika konflik Thailand–Kamboja masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji bagaimana kalkulasi strategis kedua negara dan persepsi ancaman yang saling berkembang berkontribusi terhadap berulangnya eskalasi konflik di kawasan perbatasan Thailand–Kamboja.

Kondisi yang ada menunjukkan bahwa konflik Thailand–Kamboja tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa wilayah yang telah berlangsung lama, tetapi juga oleh cara masing-masing negara memaknai tindakan pihak lain. Dalam situasi seperti ini, tindakan yang bertujuan meningkatkan keamanan justru dapat dipersepsikan sebagai ancaman sehingga memicu respons serupa. Oleh karena itu, perlu dipahami bagaimana kedua negara melakukan kalkulasi strategis terhadap tindakan lawannya dan bagaimana persepsi ancaman tersebut membentuk dinamika konflik. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan *game theory* dan *security dilemma*. *Game theory* digunakan untuk memahami bagaimana negara mengambil keputusan strategis dalam situasi konflik, sedangkan *security dilemma* digunakan untuk menjelaskan bagaimana tindakan defensif dapat memicu persepsi ancaman dan meningkatkan ketegangan antarnegara.

Artikel ini berargumen bahwa eskalasi konflik Thailand-Kamboja tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa wilayah yang telah berlangsung lama, tetapi juga oleh kalkulasi strategis kedua negara yang diperkuat oleh dinamika *security dilemma*. Akibatnya, tindakan yang bertujuan meningkatkan keamanan justru mendorong meningkatnya persepsi ancaman dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik. Untuk memahami fenomena tersebut, artikel ini menggunakan pendekatan *game theory* dan *security dilemma*. Kedua pendekatan tersebut memungkinkan penjelasan mengenai bagaimana negara mengambil keputusan strategis serta bagaimana persepsi ancaman dapat memengaruhi perilaku negara dalam situasi konflik.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konflik perbatasan Thailand–Kamboja melalui perspektif Game Theory dan Security Dilemma. Penelitian ini berupaya menjelaskan bagaimana kedua negara melakukan kalkulasi strategis terhadap tindakan lawannya serta bagaimana persepsi ancaman yang muncul dalam interaksi tersebut berkontribusi terhadap terjadinya eskalasi konflik yang berulang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk mengkaji dinamika konflik perbatasan antara Thailand dan Kamboja. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini berupaya memahami serta menjelaskan fenomena konflik melalui interpretasi terhadap berbagai sumber data yang relevan, khususnya yang berkaitan dengan pengambilan keputusan strategis negara dan dinamika keamanan dalam hubungan internasional. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak berfokus pada pengukuran kuantitatif, melainkan pada pemaknaan terhadap tindakan, kebijakan, serta interaksi yang dilakukan oleh aktor-aktor yang terlibat dalam konflik.

Ruang lingkup penelitian difokuskan pada konflik perbatasan Thailand–Kamboja yang berpusat pada sengketa wilayah di sekitar Kuil Preah Vihear. Analisis penelitian mencakup periode eskalasi konflik tahun 2008-2011 serta perkembangan konflik pada tahun 2025 yang kembali memunculkan ketegangan antara kedua negara. Fokus penelitian diarahkan pada bagaimana Thailand dan Kamboja melakukan kalkulasi strategis terhadap tindakan lawan serta bagaimana persepsi ancaman yang muncul dari tindakan tersebut memengaruhi dinamika konflik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak berfokus pada aspek hukum internasional ataupun kajian historis semata, melainkan pada proses pengambilan keputusan dan interaksi keamanan yang terjadi antara kedua negara.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*). Pengumpulan data dilakukan dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan konflik Thailand–Kamboja, teori hubungan internasional, serta isu keamanan kawasan. Sumber data yang digunakan meliputi artikel jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dokumen resmi organisasi internasional, putusan International Court of Justice (ICJ), publikasi ASEAN, serta sumber-sumber pendukung lain yang relevan. Literatur mengenai konflik Thailand–Kamboja digunakan untuk memahami latar belakang, perkembangan, dan upaya penyelesaian konflik, sedangkan literatur mengenai *Game Theory* dan *Security Dilemma* digunakan sebagai landasan analisis dalam menjelaskan perilaku kedua negara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini memaparkan temuan penelitian dalam lima sub-bahasan. Pertama, pemetaan dinamika konflik Thailand-Kamboja dari akar sejarah hingga eskalasi 2025. Kedua, analisis *Game Theory* untuk mengungkap rasionalitas strategis kedua negara. Ketiga, analisis *Security Dilemma* untuk menjelaskan perangkap persepsi yang memicu spiral konflik. Keempat, evaluasi kritis terhadap peran ASEAN sebagai mediator regional. Kelima, sintesis integratif antara rasionalitas kalkulatif dan ketidakpercayaan yang menciptakan siklus konflik berulang.

1. Dinamika Konflik Thailand-Kamboja: Akar Sejarah hingga Eskalasi 2025

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja berakar pada periode kolonial. Berdasarkan Perjanjian Prancis-Siam pada 23 Maret 1907, terjadi pertukaran wilayah dan penentuan batas antara Kerajaan Siam (Thailand) dan Kamboja yang saat itu berada di bawah protektorat Prancis (Admin, 2025). Sebagai tindak lanjut, sebuah komisi gabungan menghasilkan peta yang dikenal sebagai *Annex I Map*, yang menempatkan Candi Preah Vihear dalam teritori Kamboja di bawah administrasi Prancis. Namun, peta tersebut tidak secara jelas mengatur batas wilayah daratan di sekitar candi, sehingga meninggalkan ambiguitas yang menjadi sumber sengketa hingga saat ini (Meyer, 2009). Setelah Kamboja merdeka pada 1953, Thailand kembali menduduki kawasan Preah Vihear, memicu Kamboja membawa kasus tersebut ke Mahkamah Internasional (ICJ). Pada 1962, ICJ memutuskan bahwa candi tersebut milik Kamboja, tetapi putusan itu tidak mengatur lahan seluas 4,6 km² di sekitarnya, yang hingga kini menjadi titik sengketa utama (Meyer, 2009).

Eskalasi pertama yang signifikan terjadi pada 2008, ketika UNESCO menetapkan Candi Preah Vihear sebagai Situs Warisan Dunia pada 7 Juli 2008. Keputusan ini memicu gelombang nasionalisme di Kamboja sekaligus menjadi senjata politik bagi kelompok nasionalis di Thailand. Menurut (Ciorciari, 2009), situasi ini mendorong kedua negara untuk mengerahkan kekuatan militer di area perbatasan. Thailand menduduki Pagoda Keo Sikha Kiri Svava di dekat candi, sementara Kamboja memperkuat posisi di Candi Ta Krabei. Ketegangan berubah menjadi pertempuran terbuka pada 3 Oktober 2008 dan kembali memuncak pada 15 Oktober 2008, di mana miskomunikasi dalam rotasi pasukan memicu baku tembak dengan granat dan artileri. Pertempuran berlanjut pada April 2009, menewaskan tentara dari kedua belah pihak. Puncak eskalasi periode ini terjadi pada 4–7 Februari 2011, dengan pertempuran artileri skala besar yang melibatkan ribuan pasukan. Kamboja melaporkan empat prajurit dan satu polisi gugur, dengan sekitar 13.000 warga sipil mengungsi, sementara Thailand melaporkan dua prajurit dan dua warga sipil tewas (Ciorciari, 2009). Bentrokan kembali pecah pada April–Mei 2011 di area Candi Ta Moan dan Ta Krabei, memperluas zona konflik. Pola eskalasi 2008-2011 menunjukkan bahwa setiap perundingan diplomatik selalu diiringi peningkatan pasukan di lapangan, dan meskipun ICJ pada 2013 kembali menegaskan kedaulatan Kamboja atas candi, ketegangan tidak pernah benar-benar mereda.

Memasuki tahun 2025, konflik kembali meletus dengan intensitas yang lebih tinggi. Menurut Teekah (2025), insiden baku tembak singkat di Persegitiga Zamrud pada 28 Mei 2025 menewaskan satu tentara Kamboja. Insiden ini memicu respons politik keras: Kamboja memberlakukan larangan impor, sementara Thailand menutup pos perbatasan dan memutus jaringan listrik bersama. Titik kritis terjadi pada 23-24 Juli 2025, ketika seorang tentara Thailand terluka parah akibat ranjau saat patroli. Hal ini memicu saling curiga yang sangat tinggi, dan pada 24 Juli, baku tembak meluas ke banyak titik perbatasan. Thailand mengklaim Kamboja menembakkan roket BM-21 ke wilayah sipil Thailand, sehingga Thailand merespons

dengan serangan udara menggunakan jet tempur F-16 untuk pertama kalinya sejak 1988. Serangan udara ini menandai eskalasi kualitatif yang belum pernah terjadi sebelumnya (Teekah, 2025). Pertempuran terbuka selama beberapa hari menyebabkan lebih dari 200.000 warga mengungsi ke kedua sisi perbatasan. Gencatan senjata tanpa syarat akhirnya disepakati pada 28 Juli 2025, namun hanya bertahan hingga Desember 2025, ketika Thailand kembali melancarkan operasi darat dan udara bernama "Sattawat" pada 7–10 Desember, merebut beberapa desa strategis di Kamboja. Gencatan senjata 72 jam kembali disepakati pada 27 Desember 2025.

Dari rangkaian peristiwa di atas, terlihat pola siklus yang jelas: (1) pemicu politik/administratif, (2) pengerahan militer defensif, (3) eskalasi akibat insiden kecil dan mispersepsi, (4) pertempuran skala besar, dan (5) gencatan senjata tanpa perubahan struktur. Pola ini menunjukkan bahwa konflik tidak hanya dipengaruhi oleh sengketa teritorial, tetapi juga oleh dinamika strategis dan persepsi antarnegara (Alam et al., 2026). Militerisasi perbatasan yang terus-menerus, menurut Alam et al. (2026), berdampak signifikan terhadap stabilitas kawasan, menciptakan lingkungan yang rawan konflik dan menghambat kerja sama ekonomi regional.

2. Analisis *Game Theory*: Rasionalitas Strategis dalam Permainan Konflik

Untuk memahami mengapa Thailand dan Kamboja terus memilih konfrontasi meski sama-sama merugikan, kita perlu melihat konflik ini sebagai sebuah permainan strategis (*strategic game*). Dalam kerangka *Game Theory*, negara diasumsikan sebagai aktor rasional yang memaksimalkan keuntungan (*payoff*) dan meminimalkan kerugian. Setiap keputusan diambil dengan mempertimbangkan respons potensial dari pihak lawan, menciptakan interdependensi strategis. Sebagaimana dijelaskan Snidal (1985), *Game Theory* menyediakan alat untuk menganalisis perilaku negara dalam situasi di mana hasil keputusan satu aktor bergantung pada pilihan aktor lain. Dalam konteks Thailand–Kamboja, interaksi mereka dapat dimodelkan ke dalam struktur *Prisoner's Dilemma* yang dimainkan secara berulang (*iterated game*).

Secara sederhana, setiap negara memiliki dua pilihan strategi dasar: Menahan Diri (M) atau Memperkuat Militer (E). Jika kedua negara memilih Menahan Diri, situasi perbatasan relatif tenang dengan biaya militer rendah dan stabilitas kawasan terjaga (*payoff* tinggi). Jika satu negara memperkuat militer dan yang lain menahan diri, negara yang memperkuat akan memperoleh keuntungan strategis (*payoff* sangat tinggi), sedangkan lawannya dirugikan (*payoff* rendah). Jika keduanya memperkuat militer, maka konflik terbuka terjadi, menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, dan sanksi internasional (*payoff* sangat rendah). Menurut Correa (2001), dalam permainan satu putaran, pilihan rasional adalah memperkuat militer karena jika lawan menahan diri, mereka menang besar; jika lawan memperkuat, setidaknya mereka tidak kalah telak. Namun karena konflik ini berulang, kedua negara seharusnya bisa membangun kerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik (menahan diri bersama). Lalu mengapa kerja sama gagal?

Hambatan utama adalah ketidakpercayaan dan insentif jangka pendek. Dalam permainan berulang, strategi "Tit-for-Tat" (membalas tindakan lawan) sering menjadi solusi optimal. Namun, dalam konflik ini, kesalahan persepsi membuat penerapan Tit-for-Tat menjadi bumerang. Sebagai contoh, ketika Thailand membangun jalan militer di zona sengketa, langkah tersebut secara kalkulatif dimaksudkan untuk mempertegas klaim teritorial dan meningkatkan logistik. Namun Kamboja tidak melihatnya sebagai defensif, melainkan sebagai ofensif, sehingga merespons dengan peningkatan patroli. Thailand lalu membaca respons Kamboja sebagai provokasi, dan meningkatkan lagi. Alih-alih meniru tindakan menahan diri (yang menguntungkan), mereka justru meniru tindakan eskalasi, menciptakan spiral tak terkendali.

Correa (2001) menekankan bahwa dalam situasi anarki, komunikasi yang buruk dan kurangnya informasi sering mengarah pada hasil yang suboptimal bagi semua pihak. Selain itu, *payoff* konflik tidak hanya dihitung dari keamanan fisik, tetapi juga stabilitas politik domestik. Bagi pemerintah Thailand dan Kamboja, mengirim pasukan ke perbatasan sering kali menjadi cara untuk meredam kritik nasionalis. Dengan demikian, selama konflik memberikan keuntungan politik bagi elit penguasa, maka pilihan "Menguatkan Militer" akan terus dianggap rasional, meskipun secara keseluruhan merugikan rakyat dan perekonomian kedua negara.

3. Analisis *Security Dilemma*: Perangkap Persepsi dan Spiral Konflik

Jika *Game Theory* menjelaskan apa yang dipilih kedua negara, maka *Security Dilemma* menjelaskan mengapa pilihan tersebut justru memperburuk keadaan. Robert Jervis (1978) mendefinisikan *Security Dilemma* sebagai situasi di mana tindakan yang diambil suatu negara untuk meningkatkan keamanannya justru mengurangi keamanan negara lain, karena ketidakmampuan membedakan antara persenjataan ofensif dan defensif. Dalam kasus Thailand–Kamboja, perbedaan antara langkah defensif dan ofensif menjadi sangat kabur. Thailand mengklaim penempatan pasukan di perbatasan adalah untuk melindungi kedaulatan. Namun bagi Kamboja, tank dan artileri Thailand yang ditempatkan di dekat perbatasan adalah ancaman ofensif langsung. Sebaliknya, Kamboja mengklaim peningkatan patroli sebagai bentuk pertahanan diri, tetapi Thailand melihatnya sebagai upaya *de facto* mengambil alih area sengketa. Ketidakmampuan membedakan intensi ini adalah inti dari *Security Dilemma* (Jervis, 1978).

Spiral konflik terbentuk melalui siklus: (1) Thailand merasa tidak aman dan meningkatkan kekuatan militernya; (2) Kamboja tidak tahu apakah peningkatan Thailand defensif atau ofensif, sehingga untuk amannya Kamboja juga meningkatkan kekuatannya; (3) Thailand melihat peningkatan Kamboja dan menganggapnya sebagai konfirmasi niat ofensif, sehingga Thailand meningkatkan lagi. Siklus ini berlanjut hingga pada titik tertentu, insiden kecil (seperti ranjau atau tembakan peringatan) memicu pertempuran karena kedua pihak sudah dalam kondisi high alert. Peristiwa 24 Juli 2025 adalah contoh sempurna: Thailand menganggap ranjau yang melukai tentaranya sebagai agresi Kamboja, lalu merespons dengan serangan udara. Kamboja menganggap serangan udara sebagai provokasi besar, lalu membalas. Pada akhirnya, kedua negara saling menuduh sebagai korban, dan keduanya mengklaim bertindak untuk "membela diri" (Teekah, 2025). Ironisnya, tidak ada satu pun pihak yang menginginkan perang skala penuh, namun mereka terdorong masuk ke dalam konflik oleh logika *Security Dilemma*.

Fenomena serupa juga ditemukan dalam konflik lain. Muradov (2022) menunjukkan bahwa *Security Dilemma* berperan besar dalam eskalasi perang Rusia-Ukraina, di mana langkah defensif Rusia dianggap sebagai ancaman ofensif oleh Ukraina dan NATO, sehingga memicu respons yang memperburuk ketegangan. Begitu pula Raeesa dan Akhtar (2025) menganalisis rivalitas India-Pakistan dan menemukan bahwa ketidakpercayaan yang mendalam membuat setiap pengerahan militer, betapapun defensifnya, selalu dipersepsikan sebagai ancaman eksistensial oleh pihak lawan. Kondisi anarki di kawasan Asia Tenggara, tanpa otoritas pusat yang memaksa, memperburuk *Security Dilemma* karena tidak ada jaminan bahwa pihak lawan akan menepati janji. Akibatnya, meskipun ada mediasi dari ASEAN, kedua negara terus mempertahankan postur militer yang tinggi.

4. Evaluasi Peran ASEAN: Mediasi Reaktif yang Belum Memutus Siklus

ASEAN sebagai organisasi regional telah berupaya menjadi mediator dalam konflik ini. Pada 2011,

Indonesia sebagai ketua ASEAN berhasil menjembatani dialog melalui empat jalur: (1) pertemuan informal di Jakarta, (2) pertemuan *Joint Border Committee* (JBC) di Bogor, (3) pertemuan trilateral saat KTT ASEAN ke-18, dan (4) pertemuan formal Menteri Luar Negeri ASEAN (AMM) (Putra et al., 2026). Upaya ini menunjukkan peran aktif ASEAN dalam meredakan ketegangan dan mendorong kedua negara untuk kembali ke meja perundingan. Pada 2025, ketika konflik kembali pecah, Malaysia sebagai ketua ASEAN mendorong pertemuan AMM untuk de-eskalasi dan mengirim tim pengamat ASEAN untuk memantau kondisi di lapangan (Jingga, 2025a; Jingga, 2025b).

Meskipun upaya mediasi ini penting untuk menghentikan pertempuran fisik, analisis *Game Theory* dan *Security Dilemma* menunjukkan bahwa mediasi ASEAN hanya menangani gejala, bukan akar masalah. ASEAN berhasil menekan kedua negara untuk melakukan gencatan senjata, tetapi tidak berhasil mengubah struktur insentif (*payoff*) yang membuat konfrontasi tetap menjadi pilihan rasional. Contohnya, mediasi 2011 menghasilkan gencatan senjata, tetapi pada 2025 konflik pecah lagi dengan intensitas lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa mediasi tanpa disertai mekanisme verifikasi lapangan dan pembangunan kepercayaan (*confidence-building measures*) hanya berfungsi sebagai "plaster" sementara (Tokan et al., 2026). Tokan et al. (2026) dalam evaluasinya menyimpulkan bahwa ASEAN belum memiliki instrumen yang cukup kuat untuk memaksa kedua negara menarik pasukan secara permanen. Prinsip dasar ASEAN yang mengutamakan non-intervensi dan konsensus justru menjadi kelemahan karena ASEAN tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi tegas.

Selain itu, aspek hukum internasional juga menjadi tantangan tersendiri. Putra dan Astuti (2026) menyoroti bahwa meskipun ICJ telah mengeluarkan putusan yang jelas mengenai kepemilikan Candi Preah Vihear pada tahun 1962, implementasi putusan tersebut di lapangan tidak berjalan efektif karena Thailand tidak sepenuhnya menarik pasukan dari area sengketa. Ketidakpatuhan terhadap putusan ICJ ini menunjukkan bahwa hukum internasional saja tidak cukup untuk menyelesaikan konflik jika tidak didukung oleh mekanisme penegakan yang kuat dan kemauan politik dari pihak-pihak yang bersengketa (Putra & Astuti, 2026). Oleh karena itu, ASEAN sebagai organisasi regional memiliki tanggung jawab untuk mendorong kepatuhan terhadap hukum internasional, namun kewenangannya sangat terbatas.

5. Sintesis Temuan: Rasionalitas yang Irasional dan Jalan Keluar

Setelah memaparkan data empiris, analisis *Game Theory*, dan analisis *Security Dilemma*, sintesis temuan utama adalah sebagai berikut: eskalasi konflik Thailand-Kamboja merupakan produk dari interaksi antara rasionalitas kalkulatif dan perangkat persepsi. Secara kalkulatif (*Game Theory*), kedua negara memilih eskalasi karena struktur insentif (*payoff*) yang ada membuat konfrontasi tampak lebih menguntungkan daripada kerja sama, terutama jika dikaitkan dengan stabilitas politik domestik. Hal ini sejalan dengan argumen Snidal (1985) bahwa dalam situasi anarki, negara cenderung memilih strategi yang memberikan keuntungan jangka pendek meskipun merugikan jangka panjang. Namun secara persepsi (*Security Dilemma*), pilihan kalkulatif tersebut diperkuat oleh ketidakpercayaan yang menyebabkan tindakan defensif dipahami sebagai ofensif, sehingga memicu spiral yang tak terkendali. Jervis (1978) menegaskan bahwa tanpa adanya kemampuan untuk membedakan antara persenjataan defensif dan ofensif, serta tanpa mekanisme komunikasi yang kredibel, kerja sama hampir mustahil tercapai.

Dengan kata lain, Thailand dan Kamboja bukanlah aktor irasional yang menikmati perang. Mereka adalah aktor rasional yang terjebak dalam sistem yang menghargai konflik. Hal ini menjelaskan paradoks mengapa kedua negara terus berkonflik meskipun sama-sama menderita kerugian ekonomi dan korban jiwa.

Konflik berulang bukan karena kebodohan, tetapi karena struktur permainan dan kondisi ketidakpercayaan yang belum berubah. Lebih jauh, Alam et al. (2026) menyoroti bahwa militerisasi perbatasan yang terus-menerus menciptakan lingkungan yang tidak stabil dan menghambat investasi serta kerja sama ekonomi di kawasan, sehingga dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kedua negara, tetapi juga oleh stabilitas Asia Tenggara secara keseluruhan.

Berdasarkan temuan ini, jalan keluar tidak hanya terletak pada perundingan diplomatik formal, tetapi pada perubahan struktur insentif dan persepsi. Beberapa langkah konkret yang dapat diambil antara lain: (1) ASEAN perlu membentuk tim pemantau permanen yang dilengkapi dengan teknologi pengawasan untuk memastikan kedua pihak tidak melakukan pengerahan pasukan secara sepihak, sehingga mengurangi ketidakpastian dan membangun kepercayaan; (2) ASEAN dapat menawarkan insentif ekonomi (bantuan pembangunan, akses pasar) bagi kedua negara jika mereka setuju melakukan demiliterisasi di zona sengketa, serta menerapkan sanksi atau penalti jika salah satu pihak memicu eskalasi, dengan demikian mengubah *payoff* dari konfrontasi menjadi sangat merugikan; (3) ASEAN perlu mendorong perjanjian yang lebih mengikat secara hukum, mungkin dengan melibatkan PBB, untuk memberikan sanksi tegas jika terjadi pelanggaran gencatan senjata. Tokan et al. (2026) menekankan bahwa tanpa perubahan paradigma dari "non-intervensi" menjadi "keterlibatan aktif yang konstruktif", ASEAN akan terus gagal memutus siklus konflik ini. Tanpa perubahan pada struktur insentif dan persepsi, siklus eskalasi 2008–2011 dan 2025 kemungkinan besar akan terulang kembali pada tahun-tahun mendatang. Konflik ini menjadi pelajaran penting bahwa perdamaian tidak hanya membutuhkan kemauan politik, tetapi juga rekayasa strategis untuk membuat kerja sama lebih rasional daripada konflik.

KESIMPULAN

Konflik perbatasan Thailand-Kamboja dapat dipahami lebih komprehensif bila kedua kerangka ini digabung. *Game theory* menjelaskan dinamika keputusan di balik setiap langkah diplomasi dan militer, sedangkan *security dilemma* menjelaskan hasil akhir hubungan yang kian tegang. Dengan melihat konflik sebagai *iterated game* dalam konteks anarki regional, kita memahami bagaimana kebijakan yang rasional sekalipun dapat memicu spiral kekerasan tanpa kehadiran mekanisme penenang eksternal. Pendekatan ganda ini mencerminkan situasi sebenarnya: negara bertindak sesuai logika kepentingan, tetapi akibatnya tidak bisa terlepas dari efek samping keselamatan timbal-balik.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin. (2025, October 4). *The Franco-Siamese Treaty of 23 March 1907: Borders, Politics, and the Return of Angkor*. Wonders of Cambodia. <https://wondersofcambodia.com/the-franco-siamese-treaty-of-23-march-1907-borders-politics-and-the-return-of-angkor/>
- Alam, M. D., Rohmawati, A. W., Balqis, I., & Subandi, Y. (2026). Militerisasi Perbatasan dan Dampaknya Terhadap Stabilitas Kawasan: Studi Kasus Thailand-Kamboja. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 4(2), 193–198. <https://doi.org/10.60126/jim.v4i2.1458>
- Ciorciari, J. D. (2009). *FSI | SPICE - Thailand and Cambodia: The Battle for Preah Vihear*. Spice.fsi.stanford.edu. https://spice.fsi.stanford.edu/docs/thailand_and_cambodia_the_battle_for_preah_vihear

- Correa, H. (2001). *Game Theory as an Instrument for the Analysis of International Relations*. https://www.ritsumei.ac.jp/ir/isaru/assets/file/journal/14-2_hector.pdf
- Gupta, A. (2024). *Different Emotions in the USA-China Trade War*. https://cms.kspp.edu.in/public/issuebrief/issuebriefdocument_670f6be6c52bf.pdf
- Haidari, M. (2024). Analyzing Analyzing the Role of Cross Border Trade Policies in Facilitating Pak-Afghan Trade Post –Taliban. *International Journal of Management and Business Applied*, 3(1), 21–30. <https://doi.org/10.54099/ijmba.v3i1.896>
- Ibrahim Muradov. (2022). RUSSIA’S WAR AGAINST UKRAINE: SECURITY DILEMMA OR WHAT? *ResearchGate*, 10. https://www.researchgate.net/profile/Ibrahim-Muradov/publication/360223019_RUSSIA
- Jervis, R. (1978). Cooperation under the Security Dilemma. *World Politics*, 30(2), 167–214.
- Jingga, R. P. A. (2025a, December 12). *Menlu ASEAN segera rapat bahas deeskalasi konflik Thailand-Kamboja*. Antara News; ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/5302501/menlu-asean-segera-rapat-bahas-deeskalasi-konflik-thailand-kamboja>
- Jingga, R. P. A. (2025b, December 14). *ASEAN kerahkan tim pengamat dorong deeskalasi konflik Thailand-Kamboja*. Antara News; ANTARA. <https://www.antaranews.com/berita/5304682/asean-kerahkan-tim-pengamat-dorong-deeskalasi-konflik-thailand-kamboja>
- Meyer, S. (2009). Preah Vihear Reloaded – the Thai-Cambodian Border Dispute. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 28(1), 47–68. <https://doi.org/10.1177/186810340902800104>
- putra, rangga eka, & Dwi, Astuti Palupi. (2026). Penyelesaian Sengketa Candi Preah Vihear antara Thailand dan Kamboja dalam Kerangka Hukum Internasional - Repository Univ. Bung Hatta. *Bunghatta.ac.id*. <http://repository.bunghatta.ac.id/id/eprint/3368/1/REPOSITORY%20BAB%201%20RANGGA%20EKA%20PUTRA%2022-050.pdf>
- Putra, T., Tri, D., & Dr. Reni Windiani, M.S. (2026). Strategi Indonesia Dalam Kepemimpinan ASEAN 2011 (Analisis Peranan Indonesia Sebagai Penengah Konflik Thailand-Kamboja Tahun 2008-2011). *Journal of Politic and Government Studies*, 0(0), 1–9. <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/view/2138>
- Snidal, D. (1985). The Game Theory of International Politics. *World Politics*, 38(1), 25–57. <https://doi.org/10.2307/2010350>
- Susanto, R. (2025). Konflik Sumber Daya Air di Perbatasan Internasional: Kajian Hukum internasional atas Hak Pemanfaatan Sungai Mekong: Transboundary Water Conflict: An International Legal Study of Mekong River Utilization. *Iuridica et Societas*, 1(1), 087-112. <https://journal.maranatha.edu/index.php/iuridica/article/view/13333>
- Teekah, E. (2025, July 29). *Thailand-Cambodia Conflict (2025) | Background, Escalation, & Ceasefire*. Encyclopedia Britannica. <https://www.britannica.com/event/Thailand-Cambodia-Conflict>
- Tokan, A. E. A. G., Lape, F. M. I. O., & Subandi, Y. (2026). Evaluasi Peran ASEAN Dalam Menangani Konflik antara Thailand dan Kamboja Tahun 2025. *Jurnal Ilmiah Multidisipin*, 4(1), 72–78.
- Umme Raeesa, & Akhtar, N. (2025, July 6). *India-Pakistan Security Dilemma: Analyzing the Deterrence and Coercive Diplomacy in the Context of Regional Stability*. *Journal of Development and Social Sciences*. [https://doi.org/10.47205/jdss.2025\(6-II\)42](https://doi.org/10.47205/jdss.2025(6-II)42)